

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

(Studi Putusan Nomor 128/ PID/SUS/2014/PN.TK)

Oleh:

BAYU MJ. PRADHANA

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan (2) Bagaimana Proses Penjatuhan Hukuman Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum POLRI dalam putusan perkara No. 128/PID.SUS/2014/PN.TK telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAYU MJ. PRADHANA

Adapun saran penulis agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap para pelaku Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedarannarkotika. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

Kata Kunci : Narkotika, Anggota Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian

ABSTRAK

CRIMINAL RESPONSIBILITY TO POLICY MEMBER WHO ACCESSIBLE CRIMINAL INFRINGEMENT OF DRUGS

(Study of Decision Number 128 / PID / SUS / 2014 / PN.TK)

Oleh

BAYU MJ. PRADHANA

A criminal offense is an act committed by a responsible human being whose conduct is prohibited or ordered or permitted by criminal law which is sanctioned in the form of criminal sanction. To distinguish an act as an offense or not a criminal offense is whether the act is granted criminal sanctions or not given criminal sanctions. But there are some police officers who even abuse their authority by using and distributing drugs or drugs. This of course can lead to loss of public confidence to the police to provide assurance of legal certainty or provide legal protection to the community Based on the description that became the main problem in this thesis are: (1) How Criminal Liability Against Police Members Who Conduct Criminal Acts of Abuse Drugs and (2) How the Punishment Process Against Police Officers Conducting the Crime of Drug Abuse

The problem approach used is normative jurisdiction supported by empirical juridical. The data used are primary and secondary data, data collection with literature study and interview. While data processing through the stage of data examination, data selection, data classification, and data systematization. The data that have been presented in the form of description, discussed and analyzed descriptively qualitative, for further drawn conclusion.

Based on the results of research that has been done, the application of criminal law material by the Judge to the criminal act of abuse of Narcotics by POLRI elements in the decision of case no. 128 / PID.SUS / 2014 / PN.TK is appropriate because the crime committed by the Defendant has fulfilled the elements of the criminal requirement or has complied with the provision of sanction against the crime of drug abuse of class I as referred to in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics.

As for the author's suggestion to increase the supervision of the perpetrators of the need for supervision on the implementation of criminal sanctions and internal sanctions against the

BAYU MJ. PRADHANA

criminal acts of narcotics abuse committed by members of the police so that sanctions can be applied with a firm and give a deterrent effect to the perpetrators. Police officers and related institutions to intensify the supervision of the alleged routes of entry of narcotics circulation. Provide sanctions weighing against members of the police who committed criminal acts, especially narcotics because police members should be a role model for the community. This is intended to be a learning for other police members not to commit acts that violate the code of ethics of the police profession.

Keywords: Narcotics, Police Officers and Police Code of Conduct